

Strategi Penggulangan Kemiskinan Berbasis Pluralisme Kesejahteraan: Studi Kasus Program Bedah Rumah Kulon Progo

Muhammad Lukman Hakim¹, Al Fauzi Rahmat²

¹Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis: lukmanhakim9663@gmail.com

ABSTRAK

Mengapa kemudian persoalan pembangunan kesejahteraan melalui program bedah rumah menjadi teramat penting. Pembangunan kesejahteraan melalui program bedah rumah menjadi teramat penting karena mengingat tentang bagaimana proses kesejahteraan yang di tawarkan melalui konsep kolaborasi dan gotong royong yang mana prinsip gotong royong merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia karena mengingat Persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta dimana Indonesia adalah negara yang di besarkan melalui asas gotong royong maka sudah sewajarnya apabila urusan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi tanggungan bersama-sama dan di bangun berdasarkan nilai-nilai gotong royong dan manusiawi.

Kata Kunci: Strategi Kesejahteraan, Bedah Rumah, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman menegaskan, bahwa setiap warga memiliki hak untuk memiliki rumah yang layak huni dengan disertai lingkungan yang sehat, aman, serasi dan juga teratur. Hak konstitusional tersebut sudah semestinya menjadi hak bagi masyarakat miskin juga, dimana kebanyakan masyarakat miskin tidak memiliki rumah yang layak huni. Ciri yang menandai masyarakat miskin adalah tidak adanya akses terhadap sarana kebutuhan dasar lingkungan, salah satunya ditandai dengan kualitas perumahan yang jauh dari standar yang layak, contohnya adalah buruknya sanitasi dan akses kesehatan (Muslim, 2011) Kondisi kemiskinan menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi diri dan keluarga, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan perumahan karena alasan ekonomi (Suradi, 2012) maka kemudian tidak semua orang mampu memiliki rumah layak huni yang kemudian tanggung jawab sebagai sesama manusia atas nama kemanusiaan adalah saling membantu.

Keberadaan tempat tinggal dalam hal ini adalah rumah menjadi aspek mendasar dalam dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Boonyabanha, 2005) tetapi semua itu tidak pernah terlepas dari berbagai aspek kehidupan dan juga peran pemerintah terkait dengan pengelolaan rumah dan kesejahteraan warganya. Selain berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, rumah juga akan menentukan pertumbuhan wilayah serta persebaran penduduk yang rasional dan berfungsi juga sebagai sumber penunjang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dll (Batudoko, 2005) dan juga mampu menyentuh langsung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pendorong pertumbuhan ekonomi (Lestari, 2017). Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi setiap orang, ketiadaan rumah bagi keluarga berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan menyebabkan ketunaan sosial (Supardi, 2016). Keberadaan rumah memiliki fungsi yang sangat penting

bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun keluarga mencakup aspek fisik, psikis dan sosial. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat perlindungan dari terpaan panas sinar matahari dan hujan, ancaman penyakit, serta serangan binatang, dapat menjadi tempat pengasuhan anak, bimbingan dan pendidikan serta tempat bersosialisasi, berinteraksi sebagai penyaluran rasa kasih sayang antar anggota keluarga. Fungsi rumah bagi keluarga fakir miskin yang utama sebagai tempat berteduh atau tempat tinggal, tanpa memperhatikan kelayakan atau persyaratan fisik, psikis dan sosial karena berbagai keterbatasan, seperti penghasilan rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar makan sehingga sangat sulit untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak maka kemudian kesejahteraan tetangga, kesejahteraan orang lain menjadi tanggung jawab bagi manusia yang lainnya.

Program bedah rumah merupakan program Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Sasaran penerima program tersebut adalah masyarakat miskin yang namanya terdaftar pada Album Kemiskinan Kulon Progo. Program bedah rumah dijalankan atas dasar Pertama, pengetasan kemiskinan. Kedua, berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Nomor 36 Tahun 2015. Data keluarga miskin dapat digunakan untuk melihat kondisi yang ada terkait kondisi rumah tangga di kulon progo, data kemiskinan tersebut digunakan untuk panduan pengetasan kemiskinan di Kulon Progo, ada empat dari 16 indikator yang terdapat dalam program bedah rumah sedangkan sisanya dimiliki oleh program lainya seperti Tomira, Airku, Batik geblek renteng, Bedah Menoreh dll. Program ini dibangun atas dukungan pluralism welfare yang mana artinya ada campuran kontribusi antara pemerintah, swasta sebagai bentuk CSR dan juga masyarakat melalui gotong royong secara sukarela yang disatukan oleh tujuan moral dan atas nama kemanusiaan. Program yang dibangun berdasarkan pluralisme kesejahteraan juga mencerminkan sarana alternatif dalam pengetasan kemiskinan dan layanan sosial (Moreno, 2010) serta menjadi langkah yang baik untuk mengatasi ketidakcukupan atas beberapa hal seperti keuangan yang dimiliki oleh pemerintah dan juga dapat merangsang sektor publik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Shi, 2016). Selain berfungsi sebagai program pengetasan kemiskinan juga secara prinsip program ini akan mendorong kegiatan gotong royong yang mana nilai gotong royong sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia.

Mengapa kemudian persoalan pembangunan kesejahteraan melalui program bedah rumah menjadi teramat penting. Pertama, Permasalahan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta dimana indonesia adalah negara yang di besarkan melalui asas gotong royong maka sudah sewajarnya apabila urusan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi tanggungan bersama-sama dan di bangun berdasarkan nilai-niali gotong royong dan manusiawi

Kebijakan ekonomi dan pengetasan kemiskinan tidak melulu harus mengikuti program pemerintah pusat karena nyatanya elemen pemerintah yang paling dekat dengan akar rumput adalah pemerintah daerah dan elemen dibawahnya hingga ke rt/rw. Dengan adanya desentralistik ekonomi merupakan pertanda baik adanya pengakuan atas ciri khas pembangunan dan pengembangan masyarakat lokal yang sesuai dengan ciri, karakteristik dan kebutuhan karena setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing baik dalam segi ketersediaan sumber daya, norma dan nilai ataupun kebiasaan masyarakatnya. Sekarang adalah zamannya

mendengarkan dan berkolaborasi dengan semua pihak karena kewajiban antar sesama manusia adalah sebuah keniscayaan yang harus ditempuh apabila hendak membangun kesejahteraan komunal yang berorientasi masa depan.

Konsep Pluralisme Kesejahteraan menjadi salah satu jawaban dari persoalan pengetasan kemiskinan dimana seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama dan menjadi penting karena biasanya masing-masing elemen bekerja secara sendiri seperti CSR yang umumnya melakukan pekerjaan sosial sesuai program-program yang sudah dicanangkan oleh instansinya, namun yang menjadi unik adalah program bedah rumah kulon progo ini mengangkat asas lokal yaitu gotong royong sebagai rohnyanya

Kedua, Kepemilikan rumah merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia, nyatanya masih banyak masyarakat Indonesia yang masih terjebak dalam kemiskinan sehingga pemenuhan hak dasar atas rumah tidak terpenuhi dengan maksimal maka kemudian program-program yang pro terhadap peningkatan kesejahteraan harus terus di garap secara serius. Kemudian, Bagaimana Program Bedah Rumah di kulon progo di jalankan? dan Bagaiman Kolaborasi dalam program bedah rumah ini?

LANDASAN TEORI

Pluralisme Kesejahteraan

Pembangunan perumahan dan permukiman sejatinya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (Probondaru, 2018) selain itu swasta juga memiliki tanggung jawab sosial melalui kegiatan CSR untuk turut serta mensejahterakan rakyat. Bedah Rumah Kulon progo dibangun atas dukungan pluralism welfare yang mana artinya ada campuran kontribusi antara pemerintah, swasta sebagai bentuk CSR dan juga masyarakat melalui gotong royong secara sukarela yang disatukan oleh tujuan moral dan atas nama kemanusiaan. Program yang dibangun berdasarkan pluralisme kesejahteraan juga mencerminkan sarana alternatif dalam pengetasan kemiskinan dan layanan sosial (Moreno, 2010) serta menjadi langkah yang baik untuk mengatasi ketidak cukupan atas beberapa hal seperti keuangan yang dimiliki oleh pemerintah dan juga dapat merangsang sektor publik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Shi, 2016).

Hatch dan Mocroft (1983) memberikan definisi terkait dengan Pluralisme Kesejahteraan. Dalam satu sisi pluralisme kesejahteraan menyampaikan fakta bahwa kesejahteraan sosial dapat diperoleh dari empat sektor berbeda tapi saling berkolaborasi yaitu sektor pemerintah/undang-undang, sukarela, komersial dan informal, dalam artian bahwa pluralisme kesejahteraan mengimplikasikan lebih sedikitnya peran dominan negara sebagai satu-satunya instrumen yang menyediakan layanan kesejahteraan sosial.

Munculnya konsep pluralisme kesejahteraan karena respon dari bobroknnya konsep “Welfare State” yang dianggap gagal. Jika keudian melihat Indonesia, Keberadaan elemen welfare state dalam dasar negara dan jaminan pemanfaatan sektor produksi vital untuk kemakmuran rakyat belum bisa dijadikan landasan untuk menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara dengan model institutional welfare state. Perkembangan terakhir tentang kebijakan pemerintah menyangkut kesejahteraan/keadilan sosial menunjukkan bahwa Indonesia semakin dekat ke arah bentuk welfare state. Pada tahun 2009, UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial disahkan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar orang-orang miskin, yatim piatu dan manula yang terlantar, orang dengan penyakit kronis atau cacat yang mengalami

ketidakmampuan sosial-ekonomi, dipenuhi dengan menyediakan jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung tunai (pasal 9 (1a) (2)). Premi untuk asuransi kesejahteraan sosial akan dibayarkan oleh pemerintah (pasal 10 (1) (2)). Namun sepertinya Indonesia tidak terallu cocok dengan konsep welfare state /negara kesejahteraan dan lebih cocok jika dijalankan dengan konsep pluralism welfare.

Pluralisme kesejahteraan juga dapat menjadi sarana penanganan konflik antara privat dan juga masyarakat dalam hal eksternalitas negatif yang diterima. Konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya sering terjadi karena tidak adanya sistem yang komprehensif dalam merespon eksternalitas. Merespon kondisi tersebut, pihak yang terlibat konflik: perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal merubah paradigma mereka dalam merespon perubahan perilaku di antara mereka (Mulyadi, 2003). Selama berlangsungnya pemerintahan Orde Baru terdapat konflik laten yang cukup serius di antara masyarakat lokal dengan perusahaan. Konflik tersebut diredam secara represif oleh pemerintah sehingga tidak muncul ke permukaan. Ketika desentralisasi memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, maka salah satu hal yang dilakukannya diwujudkan dalam bentuk protes pada perusahaan. Mereka menuntut perusahaan untuk memberikan pelayanan sosial sebagai bentuk kompensasi akses eksternalitas yang mereka derita. Pada sisi lain, pemerintah daerah meminta perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerjanya. Pemerintah daerah juga menuntut agar perusahaan memberikan retribusi kepadanya. Beberapa dari antara mereka telah menyusun peraturan daerah yang mengatur pungutan retribusi tersebut. Pluralisme kesejahteraan barangkali menjawab kegelisahan itu dimana kolaborasi yang terjalin memungkinkan untuk secara bersama-sama menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Kesejahteraan Sosial

Bedah rumah sangat terkait dengan bagaimana kesejahteraan sosial dijalankan, Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, hampir semua yang di lakukan dalam kehidupan berkaitan dengan orang lain (Jones, 2009) yang artinya bahwa kesejahteraan sosial juga berkaitan erat dengan bagaimana kepedulian sosial antara satu manusia dengan manusia yang lainnya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kondisi sejahtera (well-being) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut Midgley (2000: xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “..a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

Kesejahteraan sosial Menurut Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Selain itu, kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya

dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Friedlander, 2006)

Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur, *pertama*, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan. *kedua*, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi. *Ketiga*, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat (Friedlander, 2006).

Hal-hal di atas pada intinya bahwa kesejahteraan sosial berkaitan dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan harus saling membantu karena label yang sudah melekat pada manusia adalah "Mahluk Sosial" kaitannya dengan program bedah rumah adalah bahwa masyarakat miskin membutuhkan orang lain untuk bisa hidup.

Pembahasan

Program bedah rumah ini mulanya terinspirasi dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kulon Progo. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan dana CSR nya untuk memperbaiki rumah-rumah yang sudah tidak layak huni. Dana untuk pelaksanaan program bedah rumah sebelum program tersebut masuk kedalam program Dinas Sosial Kulon Progo, murni hanya menggunakan dana CSR Perusahaan. Tanpa adanya dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah setempat baik itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Namun selanjutnya program bantuan bedah rumah tersebut masuk dan terdaftar pada program Banjamsos Dinas Sosial Kulo Progo. Dana bantuan pun kini tidak dibatasi karena masyarakat biasa yang ingin menyumbangkan uangnya untuk pelaksanaan program bedah rumah juga diperbolehkan dan diterima.

Kulon progo termasuk sebagai daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia, bukti dari kemiskinan kulon progo dapat dilihat dari data banyaknya rumah tidak layak huni pada tabel di bawah ini. Namun, program inovatif ini mampu mengurangi tingkat kemiskinan di kulon progo secara signifikan, setelah tahun 2012 prosentase kemiskinan di kulon progo berkurang menjadi 23,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 23,61% dan terus menurun pada tahun-tahun sebelumnya (TKPK Kulin Progo, 2014)

Tabel Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kulon Progo Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah
Temon	499
Wates	818
Panjatan	1.028
Galur	324
Lendah	984
Sentolo	2.098
Pengasih	1.465
Kokap	2.846
Girimulyo	1.726
Nanggulan	617
Samigaluh	1.648
Kalibawang	843
Total	14.896

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo dalam Nugraha (2015)

Kriteria rumah yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah dilihat dari bagaimana kondisi rumah dan kondisi pemilik rumah serta statusnya, informasi yang dilansir dalam laman <https://dpu.kulonprogokab.go.id/> menunjukkan kriteria:

Kriteria kondisi Rumah

1. Bahan atap berupa daun/ rumbia dan genteng yang sudah lapuk/rangka atap kondisi lapuk (harus dibongkar)
2. Bahan lantai berupa tanah atau plesteran/ ubin yang sudah rusak;
3. Bahan dinding berupa bilik bambu/ kayu kualitas jelek/ rotan atau dinding bata yang sudah rapuh/ retak-retak (harus dibongkar), dinding bata luasan tidak melebihi 25% dari luasan dinding luar;
4. Tidak mempunyai pencahayaan yang cukup.

Kriteria pemilik rumah dan status rumah

1. Berdomisili tetap (penduduk) dilokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri;
2. Memiliki Kartu GAKIN atau Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/ Lurah;
3. Bersedia untuk berswadaya dan bergotong-royong;
4. Belum Pernah mendapatkan bantuan pemugaran rumah.
5. Memiliki Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Hak Atas tanah atau Surat Keterangan Kepala Desa memiliki tanah;
6. Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak dalam sengketa (misal tanah/ bangunan rumah warisan yang belum dibagi), tidak berdiri di lahan milik orang lain (yayasan pemerintah, perusahaan, dsb);
7. Rumah calon terpujar bukan masuk dalam asrama milik suatu instansi;
8. Rumah calon terpujar bukan termasuk rumah masih dalam waktu kredit perbankan;
9. Rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah misal: bantaran/tanggul, sungai, waduk, tanah kas desa, pemakaman, trotoar, ruang milik jalan.

Kolaborasi dalam Bedah Rumah

Program bedah rumah menurut Bupati Kulon Progo, selain sebagai program pengentasan kemiskinan juga pada prinsipnya secara inti adalah untuk lebih menggiatkan gotong royong (<https://kulonprogokab.go.id/>, 2019). Gotong royong sendiri sebenarnya sudah ada sejak dulu di Kulon Progo, selain itu juga di hidupi dengan spirit kolaborasi, program ini mendapat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak seperti SKPD terkait, Bazda, dunia usaha melalui CSR dan partisipasi aktif masyarakat.

Spirit kolaborasi dan gotong royong tercermin dalam spirit (Gentong Rembes)Gerakan Gotong Royong Rakyat Bersatu) yang merupakan program dari Pemkab Kulon Progo untuk menggerakkan dan menggelorakan gerakan gotong royong semua pihak agar bersatu padu dan menggerakkan kepedulian sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan peduli kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Penyelenggaraan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo dilandasi adanya komitmen Pemerintah Daerah Kulonprogo dan kepedulian sosial dari berbagai unsur masyarakat untuk membantu sesama masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah. Keterlibatan masing-masing pihak yang terkait disesuaikan dengan kewenangannya dan bersinergi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sebagai bentuk modal sosial. Hal ini sesuai pendapat Dasgupta dan Ismail Sirajudin dalam Heru Sunato, bahwa modal sosial adalah

hubungan antara personal melalui jejaring, norma perilaku bersama, budaya bersama, perasaan saling memiliki dan sepenanggungan, sehingga terjaga kesatuan bersama untuk mencapai tujuan berupa kesejahteraan sosial (Heru Sunato,2014). Keterlibatan bupati dalam bentuk komitmen secara langsung di lapangan menunjukkan kesungguhan untuk membangun penguatan institusi, jejaring dan sinergi. Terbentuknya panitia bedah rumah dari awal sampai akhir, adanya sosialisasi bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan secara bersama mencari solusi, sehingga terjadi sinergi untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan pelaksanaan bedah rumah layak huni secara partisipatoris dalam bentuk gotongroyong. Partisipasi merupakan akses dan institusi yang menentukan kualitas partisipasi. Hal yang harus dibangun antara lain, penguatan kelembagaan, penguatan jejaring dan sinergitas (Lumban Gaol,t.t).

Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bedah rumah, Getong Rembes masyarakat dapat berperan aktif membantu pelaksanaan bedah rumah seperti membantu mengalokasikan sumber potensi yang diperlukan untuk keberhasilan rehabilitasi, membantu kelompok melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melalui Peraturan Bupati Nomor 269 tahun 2009 dan diperbaharui melalui Surat Keputusan Bupati No 325 tahun 2011 tentang pembentukan badan amil zakat, menetapkan semua PNS yang beragama islam wajib mengiur 2,5 persen dari penghasilan gaji perbulan yang dikelola oleh BAZDA sehingga dana zakat yang terkumpul dari ASN Kulon Progo mencapai 15 milyar pertahun dan akan dialokasikan sebesar 150-200 juta perbulan untuk program kesejahteraan salah satunya bedah rumah (<https://jogja.tribunnews.com/>, 2018). Prestasi pengorganisir daza zakat tidak terlepas dari pemahaman zakat, dimana zakat secara umum dipahami sebagai hal yang wajib dibayarkan oleh muslim dalam islam setiap tahunnya yang diambil dari hasil kekayaannya, biasanya berupa beras dan juga sejumlah uang untuk kemudian diberikan kepada masyarakat tertentu yang membutuhkan dalam hal ini sebagian dari dana zakat digunakan untuk pemenuhan program kesejahteraan sosial salah satunya adalah bedah rumah. Pemanfaatan dana zakat yang dikelola BAZDA disalurkan untuk mendanai program bedah rumah sebesar Rp 10.000.000,- Pada saat awal pelaksanaan bedah rumah, secara simbolis bupati menyerahkan bantuan uang sebanyak Rp 10.000.000,- kepada penerima manfaat untuk keperluan bedah rumah.

Keterlibatan pihak privat atau perusahaan dalam bedah rumah di kulon progo melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) yang juga ikut memberikan bantuan berupa sumber dana perusahaan seperti BRI Wates, Gapensi Kulonprogo, RSUD Wates, Forum CSR Kabupaten Kulonprogo. Perusahaan yang berpartisipasi dalam program bedah rumah tergabung dalam forum CSR DAN Asosiasi CSR yang mana keduanya merupakan milik pemerintah (BUMD) dan juga swasta dibawah naungan pemerintah kulon progo. Status kelembagaan CSR disini adalah semi formal dimana secara politis status kelembagaan semi formal sangat mudah untuk di organisir dan juga dikendalikan oleh pemerintah sebagaimana telah di buktikan dengan pengalokasian dana CSR sebesar 36% utuk mendorong program bedah rumah meskipun ada fakta bahwa CSR tidak menjamin keberlanjutan dalam memberikan bantuan dan kontribusi namun selama CSR tetap berkontribusi maka akan memberikan sumbang sih penting bagi program bedah rumah.

Tabel Jumlah alokasi CSR untuk agenda publik 2015

Jumlah Alokasi	Pengalokasian
36%	Program Bedah Rumah Swadaya

Sumber: Laporan forum CSR, 2016

CSR milik BUMD jelas akan memberikan manfaat namun terkadang CSR dalam sektor swasta yang perlu di organisasi agar terus bisa berkolaborasi untuk ikut andil dalam kerja-kerja kesejahteraan sosial karena mengingat pada sektor swasta keberadaan CSR barangkali hanya ditujukan pertama, sebagai jaring pengaman untuk mencegah keberatan dari pihak yang terkena dampak negatif. Kedua, CSR kerap menjadi bagian dari biaya produksi sehingga tidak aneh jika program CSR digunakan untuk memaksimalkan keuntungan melalui strategi pemasaran. (Yuda, 2016)

Tabel Partisipasi dalam bedah rumah

Pemberi Bantuan	Bentuk Partisipasi
Bazda Kulon progo	Uang tunai 10.000.000
TNI/POLRI/PNS/ Perangkat Desa	Materi/uang/pikiran/tenaga
BRI, BPD, BPR	Materi/uang
Perusahaan	Materi/uang dan bahan bangunan
Masyarakat	Pemikiran, Materi/uang, Tenaga, Konsumsi
Individu	Materi/uang, Bahan konsumsi atau tenaga

Sumber: Sekretaris Daerah Kulon Progo dalam Hikmawati&Guntomo (2016)

Tabel Dana Sukarela bedah rumah

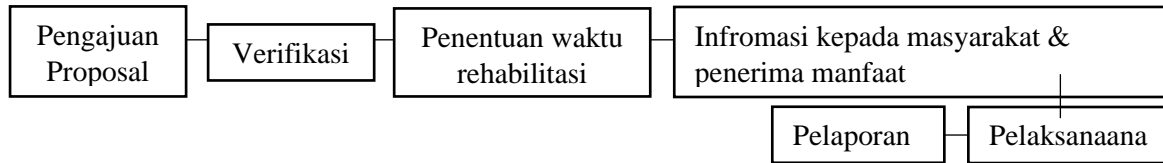
Tahun	Akumulasi dana sukarela	Penerima Manfaat
2012	1.595.155.850	183
2013	823.000.000	93
2014	1.083.495.000	94
2015	1.070.000.000	110
2016	970.000.000	97
2019	1.900.000.000	209

Sumber: Diolah dari berbagai media oleh penulis

Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Kulonprogo dalam kegiatan bedah rumah sangat tinggi. Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa partisipasi diberikan baik secara kelompok maupun secara individu, kelembagaan termasuk dunia usaha dan lembaga keuangan. Bentuk partisipasinya sangat bervariasi, mulai dari uang, barang, material, pemikiran, tenaga. Hal ini menunjukkan bahwa program bedah rumah mendapat dukungan yang positif dari seluruh elemen masyarakat, merupakan bukti adanya komitmen, kerja sama dan kepedulian sosial yang tinggi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo.

Tahapan Bedah Rumah

Tabel Tahapan Bedah Rumah



Secara umum, program bedah rumah dijalankan melalui tiga tahap, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir: Pada tahap persiapan, calon penerima program bedah rumah terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan kepada panita desa yang diketahui oleh camat. Proposal tersebut diajukan kepada bazda melalui panitia bedah rumah tingkat kabupaten. Proposal dilampiri identitas diri, foto copy KTP dan KK yang masih berlaku, surat keterangan sebagai warga miskin, pas foto ukuran 4 x 6, foto rumah yang akan direhab, alamat calon penerima manfaat, susunan kepanitiaan dan surat keterangan kepemilikan tanah. Setelah proposal diterima panitia bedah rumah tingkat kabupaten, selanjutnya tim dari bagian kesejahteraan rakyat melakukan verifikasi dan mengecek kelokasi untuk memastikan apakah proposal yang diajukan layak atau tidak layak diterima. Kriteria penerima program bedah rumah adalah keluarga yang tergolong fakir miskin yang berstatus sebagai kepala keluarga, tidak mempunyai sumber penghasilan tetap, rumah dalam kondisi rusak atau membahayakan keselamatan bagi penghuninya, memiliki tanah sendiri dibuktikan dengan surat kepemilikan, dan penduduk di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Jika proposal memenuhi kriteria dan dinyatakan layak oleh tim verifikasi, selanjutnya tim akan menginformasikan kepada panitia tingkat kecamatan dan desa untuk berkoordinasi dalam rangka menentukan waktu pelaksanaan rehabilitasi. Setelah ada kesepakatan waktu kemudian disusun jadwal pelaksanaan rehabilitasi kemudian menginformasikan kepada penerima manfaat dan masyarakat setempat agar menyiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.

Tahap Pelaksanaan: Program bedah rumah layak huni di Kabupaten Kulonproga dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012, dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dapat memantau sejak awal mulai dari pengajuan proposal, verifikasi oleh tim sampai pelaksanaan kegiatan rehabilitasi selesai. Semua pihak yang terlibat dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang benar dan bersedia menerima masukan Bedah Rumah sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan bagi keberhasilan pelaksanaan bedah rumah. Setelah ada penetapan sebagai penerima manfaat, panitia bedah rumah memberitahu pemilik bahwa rumahnya akan dibedah, agar menyiapkan segala sesuatu seperti mengamankan harta bendanya dan isi rumahnya sehingga memudahkan pelaksanaan bedah rumah. Sebelum kegiatan rehabilitasi panitia desa melalui kepala dukuh melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan bedah rumah. Kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan secara gotongroyong dengan melibatkan berbagai elemen seperti aparat sipil, TNI, Polri, warga masyarakat terutama disekitar lokasi bedah rumah dan bermitra dengan dunia usaha dan lembaga keuangan.

1. RTLH atas nama Muh. Kayat, Tawang 034/011, Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo



0 %



50 %



100 %

2. RTLH atas nama Midi, Tanggulangin 028/010, Tanjungharjo Nanggulan, Kulon Progo



0 %



50 %



100 %

3. RTLH atas nama Ngadiso, Sadang 035/013, Tanjungharjo Nanggulan, Kulon Progo



0 %



50 %



100 %

Sumber foto: dpu.kulonprokokab.go.id

Pada tahap akhir, Setelah selesai pembangunan bedah rumah, panitia tingkat desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan. Laporan pertanggungjawaban dilampiri foto rumah yang dibedah dari sebelum, proses pengerjaan, dan hasil setelah rumah dibedah. Laporan pertanggungjawaban disertai surat pernyataan penyelesaian pekerjaan, kepada bupati melalui panitia tingkat kabupaten yaitu kantor kesejahteraan rakyat, dan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kulonprogo.

KESIMPULAN

Pembangunan kesejahteraan melalui program bedah rumah menjadi teramat penting karena mengingat tentang bagaimana proses kesejahteraan yang di tawarkan melalui konsep kolaborasi dan gotong royong yang mana prinsip gotong royong merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia karena mengingat Persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta dimana indonesia adalah negara yang di besarkan melalui asas gotong royong maka sudah sewajarnya apabila urusan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi tanggungan bersama-sama dan di bangun berdasarkan nilai-niali gotong royong dan manusiawi. Sertam Kepemilikan rumah merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia, nyatanya masih banyak masyarakat Indonesia yang masih terjebak dalam kemiskinan sehingga pemenuhan hak dasar atas rumah tidak terpenuhi dengan maksimal maka kemudian program-program yang pro terhadap peningkatan kesejahteraan harus terus di garap secara serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlansyah, R. (2017). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan (Studi di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung).
- Batudoka, Z. (2005). Kota Baru dan Aspek Permukiman Mendepan. Jurnal SMARTek, 3(1), 27–36.

- Boonyabancha, S. (2005). Baan Mankong: Going to scale with “slum” and squatter upgrading in Thailand. *Environment Dan Urbanization*, 7(1), 21–46.
- Muslim Sabarisman. (2013). Perspektif Komitmen Tim Kerja Dalam Pengembangan Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin di Bondowoso. *Sosiokonsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol.18. No 01.
- Friedlander, M. L., Escudero, V., Horvath, A. O., Heatherington, L., Cabero, A., & Martens, M. P. (2006). System for observing family therapy alliances: A tool for research and practice. *Journal of Counseling Psychology*, 53(2)
- Heru Sunato, (2014) Modal Sosial, Definisi Konsep-konsep Utama dari Pemikiran Modal Sosial dan Analisis
- Suradi, dkk. (2012), Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Studi Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Perkotaan, Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial.
- Mulyadi. (2003). 'Rethinking the Role of Private Sector in Development: The Politics of Corporate Social Responsibility in Indonesia.' Makalah dijasikan pada International Worlcsshop about Policy Negotiation, Organized by Korea Dnelopment Institute Schoot of Public Policy and Management, Seoul, December 8-12, 2003
- Moreno, L. (2010). Welfare mix, CSR and social citizenship. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 30(11), 683-696.
- Shi, S. (2016). The Bounded Welfare Pluralism: Public–Private Partnerships Under Social Management in China. *Public Management Review*, 19(4), 463-478.
- Hatch S, and Mocroft L, Components of Welfare: voluntary organisations, social services and politics in two local authorities, Bedford Square Press/NCVO , 1983.
- Supardi, Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin di Desa Semelagi Besar, Skripsi, Universitas Tanjungpura Pontianak : Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2016.
- Yuda, T., K., (2016). Memaknai ulang corporate social responsibility: upaya mewujudkan fair responsibility. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), 200-217.
- Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Nomor 36 Tahun 201
- <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/116/rtlh-kulon-progo>
- https://kulonprogokab.go.id/v3/portal/web/view_berita/6892/Memupuk-Jiwa-Kegotong-Royongan-Melalui-Program-Bedah-Rumah
- <https://jogja.tribunnews.com/2018/02/13/potensi-zakat-dari-pns-di-kulonprogo-capai-rp15-miliar-setahun>